

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pertumbuhan Ekonomi

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kegiatan naiknya sebuah kapasitas produksi yang mempengaruhi pendapatan nasional.¹ Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari perkembangan fiskal yang meliputi sebuah produksi barang maupun jasa pada sebuah negara, seperti perbaikan infrastruktur, bertambahnya produksi barang industri, meningkatnya sekolah-sekolah, bertambahnya produksi pada sektor jasa, serta naiknya barang modal.² Pertumbuhan ekonomi menurut Lincoln Arsyad menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan meningkatnya *gross domestic product* (GDP) ataupun *gross national product* (GNP) tanpa perlu melihat terlebih dahulu faktor-faktor lain seperti apakah meningkatnya hal tersebut lebih tinggi ataupun lebih rendah pada pertumbuhan penduduk maupun telah terjadinya pergantian struktur ekonomi ataupun tidak.³

Ali Ibrahim Hasyim berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu fase kondisi ekonomi suatu negara mengalami perubahan secara terus menerus dan berkala guna menuju kondisi yang semakin baik pada periode tahun tertentu. Berdasarkan pendapat Ali Ibrahim Hasyim terdapat tiga hal yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi, yakni: a) meningkatkan produksi barang, b) majunya teknologi penentu naiknya pertumbuhan ekonomi guna menyediakan produk dan jasa bagi masyarakat, c) teknologi informasi yang semakin canggih serta adanya inovasi mampu dimanfaatkan secara bijak dan efisien.⁴

¹ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 88.

² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 423.

³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2004), 13.

⁴ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Kencana, 2016), 231.

Menurut Samuelson dan Norhaus secara umum pertumbuhan ekonomi pada wilayah tertentu ditentukan oleh 4 (empat) faktor, yaitu:

a. Sumber daya alam

Sumber daya alam mencakup beberapa hal seperti tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan, minyak, gas, air, hutan, dan mineral. Banyak negara-negara maju yang sudah mampu memanfaatkan hasil alamnya secara maksimal sehingga pendapatan negara tersebut menjadi sangat baik.

Sumber daya alam bukanlah satu-satunya yang menyebabkan pendapatan suatu negara meningkat, namun karena di Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah maka dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga pendapatan negara akan lebih meningkat karena tidak hanya pada sektor-sektor besar yang menjadi penyumbang pendapatan negara namun sumber daya alam juga ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi negara.

b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi suatu negara, tingkat kualitas tenaga kerja menjadi bagian yang perlu diperhatikan baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun para pelaku ekonomi berpendapat bahwa kualitas tenaga kerja ditentukan dari keterampilan, disiplin, serta pengetahuan yang dimiliki.

c. Barang modal (pembentukan modal)

Faktor penting pertumbuhan ekonomi selanjutnya ialah pembentukan modal, semakin tinggi modal yang dikeluarkan untuk berinvestasi guna menghasilkan barang modal baru maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat dengan pesat. Barang modal disini seperti jalan, pembangkit listrik, serta peralatan-peralatan lain (truk dan komputer) dan persediaan barang.

d. Teknologi

Semakin meningkatnya kualitas teknologi yang dipakai menggambarkan adanya perubahan proses dalam memproduksi suatu produk maupun jasa baru, semakin tinggi kualitas teknologi maka diikuti dengan meningkatnya produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang mampu menaikkan perekonomian sehingga bertambahnya jumlah barang dan jasa yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut pun meningkat.⁵ Pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah akan mengalami peningkatan setiap tahunnya disebabkan oleh naiknya faktor produksi barang industri yang apabila dimanfaatkan secara bijak mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi.⁶

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perhitungan tingkat pendapatan nasional dari setiap periode. Presentase pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif maupun negatif yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Berikut adalah cara untuk pengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a. Produk domestik bruto

Produk domestik bruto digunakan sebagai alat ukur barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh negara pada periode dua belas bulan.⁷ Produk domestik bruto maupun produk domestik regional bruto dalam tingkatan nasional merupakan banyaknya barang maupun jasa pada suatu ekonomi tahun tertentu yang ditentukan oleh harga pasar.

b. Produk domestik regional bruto

Berbeda dengan produk domestik bruto, produk domestik regional bruto dipakai dalam menghitung pertumbuhan ekonomi serta menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada tingkat wilayah tertentu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ialah meningkatnya pertumbuhan barang maupun jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah tertentu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melihat produk domestik bruto (PDB) pada tingkat nasional, maupun wilayah digunakan produk domestik regional bruto (PDRB) guna meningkatkan investasi masyarakat, serta tenaga kerja sesuai dengan perkembangan teknologi.

⁵ Ina Sholati Cahyaningrum, “Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2014,” *Jurnal An-Nisbah* 4, no. 1 (2017): 107.

⁶ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makro ekonomi Edisi Keempatbelas* (Jakarta: Erlangga, 1996), 250-253.

⁷ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, 34.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Berikut adalah teori-teori mengenai pertumbuhan ekonomi, teori-teori pertumbuhan ekonomi tersebut di kemukakan sebagai berikut:

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Para pemikir ekonomi klasik berpendapat bahwa ada empat hal yang memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi klasik, seperti tingkat penduduk, banyaknya barang modal, tanah dan kekayaan alam, maupun teknologi yang dipakai.⁸ Hasil dari penambahan yang menurun tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya berlangsung. Banyaknya penduduk yang relatif kecil namun sumber daya alam yang meningkat menjadikan pengembalian modal investasi relatif meningkat, karena hal ini maka usahawan dapat memperoleh untung dan meningkatkan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi mampu naik.

Smith berpendapat bahwa kekayaan alam adalah salah satu bagian penting dalam kegiatan mendorong perekonomian serta pertumbuhan ekonomi. Jika kekayaan alam tidak dipakai maksimal maka tingkat pertumbuhan penduduk serta ketersediaan modal adalah hal penting dalam pertumbuhan *output*. Namun hal tersebut akan berhenti jika kekayaan alam yang tersedia dipergunakan secara maksimal.

SDM merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pertumbuhan *output*, sedangkan ketersediaan modal ialah faktor yang menentukan tingkat *output*. Jadi tingkat serta jumlah *output* tergantung pada ketersediaan modal yang dipergunakan secara maksimal dari sumber daya alam.⁹

b. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter tentang pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada buku *The Theory Of Economic Development* terbit pada tahun 1911 yang sangat terkenal ditulis dengan menggunakan bahasa jerman, kemudian pada tahun 1934 baru buku tersebut terbit dengan menggunakan bahasa inggris. Kemudian pada tahun 1939

⁸ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, 433.

⁹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat*, 55-56.

Schumpeter menerbitkan buku lagi dengan judul *Business Cycle*. Buku ini berisi tentang suatu proses pembangunan serta faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi serta teori yang semakin banyak tentang pembangunan ekonomi.

Teori Schumpeter lebih terfokus pada peran pelaku usaha ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini dikatakan bahwa pelaku usaha adalah salah satu bagian yang selalu melakukan perubahan dan inovasi secara berkala dan menerus. Kegiatan inovasi pada teori Schumpeter ini seperti memperkenalkan kepada masyarakat mengenai produk baru, meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi barang, serta meningkatkan jangkauan pemasaran.¹⁰ Pada teori ini pertumbuhan ekonomi merupakan naiknya pendapatan nasional karena bertambahnya penduduk serta naiknya tabungan.¹¹

c. Teori Harrod Domar

Model teori Harrod Domar dibuat atas dasar pengalaman pada negara maju. Harrod berpendapat bahwa pertumbuhan yang baik (*warranted of growth*) adalah pertumbuhan penghasilan haruslah berjalan beriringan dengan rasio tabungan dengan produktivitas modal. Sedangkan menurut Domar pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan baik (*Steady of Growth*) yaitu pertumbuhan ekonomi harus berjalan sejajar dengan menabung dan produktivitas modal. Jadi pada teori Harrod Domar sebenarnya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik harus berjalan beriringan dan sejajar dengan rasio tabungan serta produktivitas modal. Pada teori ini juga dijelaskan bahwa dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan cara menabung atau berinvestasi sebanyak-banyaknya maka pertumbuhan ekonomi pun juga ikut meningkat.¹²

¹⁰ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2006), 250.

¹¹ Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2010), 252.

¹² Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, masalah, dan Dasar Kebijakan*, 256.

d. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan dan dirintis oleh dua tokoh pelaku ekonomi, dua tokoh tersebut bernama Robert Solow dan Trevor Swan. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat penawaran serta tingkat kemajuan teknologi, jadi tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berkembang apabila naiknya faktor produksi serta kemajuan teknologi.¹³ Pertumbuhan ekonomi suatu daerah mampu dilihat dengan cara melihat presentase produk PDRB.¹⁴ apakah tingkat PDRB mengalami peningkatan ataupun penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi mampu dikatakan naik atau tidak.

e. Teori Ekonomi Sektor

Teori pertumbuhan ekonomi sektor (*Sector Theory Growth*) dibuat dengan merujuk pada hipotesis Clark Fisher. Berdasarkan teori ini dijelaskan bahwa meningkatkan pendapatan per kapita pada suatu daerah sejalan oleh melemahnya sumber daya yang dipakai seperti sektor pertanian dan meningkatnya sektor industry serta sektor jasa (sektor tersier). Pertumbuhan pada setiap sektor yang selalu berubah-ubah dikatakan sebagai determinan utama pada perkembangan wilayah tertentu.¹⁵

B. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

1. Definisi Investasi

Investasi adalah salah satu pengeluaran berupa dana oleh investor guna melakukan pembiayaan pada kegiatan produksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Terdapat perbedaan pandangan secara teoritis mengenai investasi oleh beberapa ahli. Fitzgerald berpendapat bahwa investasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki kaitannya dengan sumber modal ataupun dana yang dipergunakan untuk memproduksi barang baru. Jadi investasi yaitu suatu kegiatan yang menggunakan modal untuk dipergunakan membeli barang modal guna menciptakan produk baru nantinya.

¹³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, masalah, dan Dasar Kebijakan*, 264.

¹⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Edisi 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 456.

¹⁵ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 31

Menurut Salim dan Budi, investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam bidang usaha guna mendapatkan profit.¹⁶ Selain itu Sadono Sukirno berpendapat bahwa investasi yaitu kegiatan pengeluaran penanaman modal yang dilakukan oleh pengusaha guna membeli bahan-bahan produksi sehingga nantinya dapat terciptanya barang baru. Bertambahnya barang produksi baru menciptakan perekonomian mampu menghasilkan lebih banyak barang maupun jasa pada masa berikutnya.¹⁷

Kegiatan investasi atau penanaman modal pada sebuah negara tidak hanya sebagai *output*, namun juga sebagai penentu dalam hal tenaga kerja, tingkat pendapatan, serta sebagai penentu tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas teknologi. Jika nilai penanaman modal naik maka jumlah produksi pada industri maupun kegiatan ekonomi lain juga akan meningkat sehingga tenaga kerja yang terserap akan semakin banyak. Selain penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak, penanaman modal juga sebagai salah satu sarana yang dapat menyalurkan kualitas teknologi dari negara lain ke dalam negeri guna mempermudah dalam kegiatan produksi.¹⁸

Naiknya taraf hidup masyarakat serta terbukanya lapangan kerja merupakan manfaat yang diterima dari kegiatan penanaman modal, karena terjadinya kenaikan *output* serta diikuti dengan permintaan *input* sehingga pendapatan yang diterima oleh masyarakat pun juga ikut meningkat.¹⁹

Menurut Sadono Sukirno penanaman modal mampu menjadikan masyarakat untuk terus melakukan kegiatan ekonomi serta terbukanya lapangan kerja baru dan meningkatnya pendapatan baik masyarakat maupun pendapatan nasional sehingga karena kegiatan ekonomi terus berjalan maka tingkat kesejahteraan masyarakatpun ikut meningkat. Terdapat tiga hal pokok dari kegiatan penanaman modal, yaitu: a) penanaman modal merupakan bagian dari pengeluaran, yang

¹⁶ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 31-33.

¹⁷ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, 107.

¹⁸ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, 164.

¹⁹ Sayekti Suindyah D, "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 15, no. 4 (2011): 481.

mana peningkatan penanaman modal akan mampu menambah permintaan serta pendapatan nasional akan meningkat, b) naiknya jumlah barang industri akibat dari bertambahnya barang modal akibat dari penanaman modal yang naik, c) semakin tinggi penanaman modal maka kemajuan teknologi pun akan semakin meningkat.²⁰

Peraturan mengenai penanaman modal di Indonesia telah di atur pada UU RI No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal guna percepatan pembangunan ekonomi serta kesatuan politik, peningkatan penanaman modal dibutuhkan untuk percepatan ekonomi di Indonesia dalam pengolahan potensi sumber ekonomi sehingga terjadinya peningkatan ekonomi riil memakai sumber modal baik menggunakan modal yang bersumber dari dalam negeri maupun menggunakan modal yang bersumber dari luar negeri. UU No. 25 Tahun 2007 merupakan UU revisi dari UU No. 11 Tahun 1970 mengenai PMA serta UU No. 12 Tahun 1970 mengenai PMDN karena tidak sesuai dengan kondisi ekonomi serta hukum pada penanaman modal. Penanaman modal sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama PMDN dan yang kedua yaitu PMA.²¹

2. Jenis-jenis Investasi

Investasi menurut sumber yang dipakai, dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

a. Investasi oleh Pemerintah Negara

Investasi negara merupakan penanaman modal yang sumbernya yaitu berasal dari negara, investasi negara yang dilakukan oleh pemerintah diperuntukan untuk melaksanakan dalam hal pembangunan seperti pembangunan infrastruktur jalan maupun sarana prasarana sebagai bentuk dalam meningkatkan kemudahan serta kesejahteraan rakyat. penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah ini berbentuk seperti nirlaba atau *Non Profit Motive*, contohnya seperti pembangunan infrastruktur, sekolah, listrik, irigasi, taman, bandara,

²⁰ Sayekti Suindyah D, “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur,” 481-482.

²¹ Undang-Undang RI, “25 Tahun 2007, Penanaman Modal,” (26 April 2008).

²² Henri Faizal Noor, *Ekonomi Publik Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta:Indeks, 2015), 49.

kantor pemerintah, pelabuhan, terminal, dan lain-lainnya. Modal yang dipakai dalam melaksanakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berasal dari belanja modal (APBD).

b. Investasi Oleh Pihak Swasta

Investasi swasta merupakan penanaman modal yang dananya berasal dari rakyat, investasi swasta boleh dilakukan siapa saja baik perseorangan maupun oleh perusahaan, contohnya yaitu: a) usaha mikro, b) usaha kecil menengah, c) usaha besar PMDN maupun PMA.

1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

PMDN ialah sebuah sumber dana baik berbentuk benda maupun hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah dan para pengusaha baik nasional maupun asing yang bertempat di wilayah Negara Indonesia.²³ Sesuai dengan yang disebutkan pada UU No. 25 Tahun 2007 bahwa penanaman modal dalam negeri bersumber dari warga lokal Negara republik Indonesia baik secara individu maupun atas nama badan usaha maupu oleh pemerintah dengan menanamkan modalnya di Indonesia.

2) Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA merupakan suatu kegiatan pihak pengusaha luar negeri atau yang disebut dengan investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Negara Indonesia, baik hasil dana ataupun modalnya sepenuhnya oleh pihak investor asing maupun bekerja sama dengan investor swasta lokal yang disebut dengan PMDN sesuai dengan UU RI No. 25 Tahun 2007.²⁴ PMA dalam kegiatan usahanya harus dalam bentuk PT (perseorangan terbatas).

3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

a. Definisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

PMDN (*domestic investment*) secara istilah PMDN yaitu mengeluarkan sejumlah dana oleh investor guna mengembangkan usahanya secara langsung, selain secara

²³ I.G Rai Widjaya, *Penanaman Modal Pedoman Prosedur Mnedirikan dan Menjalankan Perusahaan dalam Rangka PMA dan PMDN* (Jakarta: Pradnya Pramita, 2005), 23.

²⁴ Undang-Undang RI, “25 Tahun 2007, Penanaman Modal,” 26 April 2008.

langsung penanaman modal juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan mengeluarkan sejumlah dana guna mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Penanaman modal dalam pelaksanaannya sudah diatur pada UU No. 25 Tahun 2007 pasal 1.²⁵

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 sudah ditetapkan tentang pihak-pihak yang mampu menjadi investor PMDN, yaitu:

- 1) Rakyat perseorangan WNI;
- 2) Badan usaha Indonesia;
- 3) Badan hukum Indonesia.

PMDN terdapat pihak yang dapat mengajukan menjadi investor penanaman modal, yaitu:²⁶

- 1) PT;
- 2) CV;
- 3) Fa (Firma);
- 4) Badan saha koperasi;
- 5) BUMN;
- 6) BUMD;
- 7) Perorangan.

b. Tujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

PMDN memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Agar mendapatkan kemudahan seperti biaya produksi yang relatif kecil serta adanya manfaat pajak lokal, dan lain-lainnya;
- 2) Mendapatkan *return* yang lebih besar apabila pertumbuhan ekonomi dalam negeri naik, keuntungan pajak, serta infrastruktur yang semakin memadai;
- 3) Menjadi salah satu strategi dagang dalam bersaing dengan perusahaan lain;
- 4) Menjadi daya tarik agar PMDN semakin meningkat.

c. Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam penanaman modal terdapat beberapa manfaat di dalamnya, yaitu:²⁷

- 1) Menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan produk asing;

²⁵ Suparji, *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: UAI Press, 2013), 15.

²⁶ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Indonesia*, 129.

²⁷ Ana Rokhmatus'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 33

- 2) Hemat devisa;
- 3) Ikut mendinging majunya industri;
- 4) Menambah terbukanya lapangan kerja baru.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi PMDN, yaitu:

- 1) Sumber daya wiayah;
- 2) Budaya yang terdapat pada daerah dan masyarakat;
- 3) Memanfaatkan otonomi daerah secara bijak;
- 4) Politik nasional dan daerah;
- 5) Tindakan pemerintah daerah mengatur kebijakan lokal sehingga terciptanya kegiatan investasi sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁸

C. Belanja Modal

1. Definisi Belanja Modal

Mangkoesoebroto berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah ialah sejumlah dana yang dikeluarkan guna menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika pemerintah sudah menetapkan kebijakannya dalam penggunaan sejumlah dana guna melakukan pembelian seperti barang maupun jasa, sehingga pengeluaran yang telah dilakukan pemerintah menjadi cerminan dana yang harus dilontarkan dalam menjalankan sebuah kebijakan.²⁹

Pengeluaran pemerintah dilihat dari segi pengeluaran merupakan pemberian sejumlah dana dari pihak pusat pada pemerintah yang berada di daerah untuk menggunakan dana tersebut menutup biaya maupun hutang, bantuan atau bagian dari hasil pengutan, pemberian dana dari pihak pusat mampu digunakan oleh pemerintah daerah untuk membayar seluruh pengeluaran baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal pembangunan.³⁰

Belanja modal merupakan sebuah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meperoleh asset baik asset

²⁸ Aminuddin Hilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 88

²⁹ Guritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik Edisi Ketiga* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2001), 169.

³⁰ K.J Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah* (Jakarta: UI Press, 1988), 268.

tetap maupun asset-aset lain sehingga mampu memberikan manfaat pada satu periode ke periode lainnya.terdapat beberapa klasifikasi mengenai belanja modal, yaitu:³¹

- a. Pengeluaran modal mampu memberikan dampak positif seperti penambahan aset baik aset tetap dan aset-aset pemerintah lainnya
- b. Pengeluaran modal yang dilakukan pemerintah telah melewati minimal kapitaslisasi aset sesuai dengan ketentuan pemerintah
- c. Hasil dari aset tetap tidak untuk diperjualbelikan

Belanja modal merupakan kegiatan mengeluarkan sejumlah dana yang dipakai oleh pemerintah untuk membuat suatu aset maupun modal dalam kegiatan ekonomi sehari-hari guna memfasilitasi masyarakat baik berupa pelayanan. Belanja modal sendiri terdiri dari berbagai aset seperti irigasi, sekolah, jembatan, gedung, peralatan,³² tanah, jalanan, dan lain sebagainya.

Manfaat dari belanja modal mampu bertahan hingga sampai lebih dari satu tahun serta dari belanja modal aset suatu daerah serta hasil kekayaan daerah dapat meningkat, selain dari manfaat dan kelebihan yang didapat dari belanja modal terdapat juga dana lain yang dipergunakan sebagai dana pemeliharaan. Aset tetap nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan rutin setiap harinya dan tidak diperjualbelikan.³³

Berdasarkan teorinya, terdapat tiga hal yang bisa dilakukan guna mendapatkan harta tetap yaitu dengan cara membuat bangunan sendiri, melakukan penukaran dengan harta tetap lain serta melakukan pembelian. Kegiatan jual beli harta tetap yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menggunakan cara tender maupun lelang.³⁴

³¹ Mursyidi, *Akuntansi Pemerintah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 305.

³² Muhammad Iqbal, “Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah,” *Jom Fekon* 4, no. 1 (2017): 886.

³³ Fitriyati, “Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran pemerintah Daerah,” (2012):17.

³⁴ Syukriy Abdullah dan Abdul Halim, “Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubunganny dengan Belanja

2. Kategori Pembagian Belanja Modal

Berdasarkan PSAP pada PP No. 71 tahun 2010 dijelaskan mengenai belanja modal yaitu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mendapatkan aset tetap maupun aset-aset lain dan manfaatnya mampu dirasakan lebih dari dua belas bulan. Belanja modal terdiri dari, belanja modal bangunan, belanja modal guna mendapatkan gedung, belanja modal tanah, belanja modal peralatan, dan belanja modal aset tak berwujud. Belanja modal dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) memiliki beberapa kategori yang akan dijelaskan sebagai berikut:³⁵

a. Belanja modal bangunan dan gedung

Bangunan dan gedung sendiri meliputi seluruh bangunan-bangunan maupun gedung yang dipergunakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan siap jadi untuk dipakai. Dana yang digunakan untuk memperoleh gedung serta bangunan baik dalam hal pembelian, konstruksi, maupun pengurusan IMB, serta notaris dan pajak merupakan cerminan dari banyaknya dana yang dipakai untuk pengurusan hal tersebut.

b. Belanja modal tanah

Tanah yang dipergunakan dalam belanja modal tanah harus siap untuk dipakai karena nantinya akan dipergunakan sebagai tempat seluruh kegiatan pemerintah. Dana yang dipergunakan untuk belanja modal tanah yaitu terdiri dari biaya pembelian, biaya pematangan, biaya penimbunan, biaya pengukuran, biaya guna memperoleh hak, biaya pembebasan, serta biaya lain-lain.

c. Belanja modal irigasi, jalan, dan jaringan

Irigasi, jalan, maupun jaringan ialah seluruh irigasi maupun jalan serta bangunan-bangunan milik pemerintah. Dana yang dipergunakan untuk pembuatan irigasi, jalan, maupun jaringan yaitu meliputi biaya konstruksi serta dana lain-lainnya sampai irigasi maupun jalan serta jaringan siap untuk dipakai.

Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan,” Jurnal Akuntansi Pemerintah 2, no. 2 (2006): 19.

³⁵ Peraturan Pemerintah RI, “71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah,” (22 Oktober 2010).

d. Belanja modal peralatan

Pada belanja modal peralatan terdiri dari pembelian mesin, kendaraan, alat-alat elektronik, dan mencakup semua inventaris kantor, serta peralatan lain yang manfaatnya mampu dirasakan selama satu tahun periode dengan kondisi baik dan siap untuk digunakan. Dana yang dipergunakan untuk belanja modal peralatan yaitu meliputi biaya pembelian, biaya instalasi, biaya pengangkutan, maupun biaya-biaya lain sampai kondisi peralatan siap untuk dipakai.

e. Belanja modal aset tetap lain-lainnya

Aset-aset tersebut adalah aset-aset yang tidak termasuk dalam aset tetap tanah, peralatan, maupun irigasi, maupun lainnya yang disebutkan di atas. Namun belanja modal aset tetap lain juga dipergunakan guna kegiatan operasional pemerintah dengan kondisi yang baik dan siap untuk dipergunakan.

D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah cara yang dipakai menghitung kesejahteraan penduduk. PDRB merupakan nilai dari suatu produk maupun jasa pada wilayah tertentu dengan tidak membedakan kepemilikan faktor produksinya dalam periode satu tahun.

Tarigan berpendapat bahwa PDRB adalah nilai tambah bruto (*gross value added*) berasal dari segala jenis sektor ekonomi pada daerah tersebut. nilai tambah bruto merupakan tingkat produksi (*output*) yang dikurang dana antara (*intermediate cost*) tingkat tambah komponen bruto meliputi gaji, upah, sewa tanah, bunga, maupun keuntungan. Serta faktor lain seperti penyusutan serta pajak tidak langsung neto. Sehingga dengan menjumlahkan setiap tingkat pertambahan bruto pada setiap sektor, maka akan dihasilkan PDRB.³⁶

Dalam mengukur pembangunan regional dengan menggunakan PDRB yaitu ketika tingkat produksi barang dan jasa meningkat maka tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat juga ikut meningkat.

Salah satu cara mengukur PDRB yaitu dengan mengacu penghitungan secara nasional yaitu dalam penghitungan riilnya tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki kaitannya dengan tingkat

³⁶ Robinson Tarigan M.R.P., *Perencanaan pembangunan Wilayah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 18.

output perkapita.³⁷ Sehingga yang menjadi fokus dalam perhitungan PDRB disini yaitu tingkat *output* nya serta jumlah penduduk. Produk Domestik Regional Bruto pada tahun tertentu dapat dilihat dengan membaca data PDRB suatu wilayah dengan melihat PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) ataupun dengan melihat PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan publikasinya tahun dasar yang dipergunakan dalam PDRB ini yaitu tahun 2010 sehingga istilah yang dipakai yaitu ADHK 2010. PDRB merupakan banyaknya nilai tambah yang diproduksi oleh sektor-sektor pada sebuah negara, atau meningkatnya jumlah barang maupun jasa yang diproduksi oleh semua pelaku ekonomi.³⁸

PDRB berdasarkan ADHB menunjukkan sebuah pertambahan pada suatu barang dan jasa berdasarkan harga yang berlaku setiap tahunnya. Kemudian untuk PDRB berdasarkan ADHK menggambarkan sebuah pertambahan pada suatu barang dan jasa berdasarkan harga suatu tahun tertentu yang digunakan sebagai dasar.

PDRB berdasarkan harga berlaku bisa dipakai dalam menentukan perubahan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan dipakai dalam melihat pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah berdasarkan periode tertentu.

Tarigan berpendapat bahwa dalam menghitung dikelompokkan menjadi 2 (dua) metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung merupakan sebuah cara menghitung PDRB melalui data daerah dengan memakai sumber-sumber data yang dimiliki oleh tempat daerah tersebut. sedangkan penghitungan PDRB dengan menggunakan metode tidak langsung yaitu dengan memakai data yang berasal dari tingkat nasional yang dialokasikan ke tingkat daerah.

Hasil perhitungan PDRB dengan menggunakan metode langsung, maka PDRB bisa dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu yang pertama pendekatan dari hal produksi, yang kedua yaitu pendekatan dari hal pendapatan, dan yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran.

³⁷ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1994), 48.

³⁸ Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Bruto Kabupaten Kudus Menurut Pengeluaran* (Kudus, Badan Pusat Statistik, 2021), 2.

1. Berdasarkan Pendekatan Produksi

PDRB berdasarkan pendekatan produksi berarti banyaknya barang maupun jasa yang diproduksi oleh sektor berdasarkan tahun tertentu.

Penghitungan PDRB dengan menggunakan pendekatan produksi yaitu dengan melihat tingkat pertambahan barang maupun jasa pada sektor-sektor yang terdapat pada daerah tersebut dengan menggunakan cara mengurangi biaya dari total nilai produksi bruto sektor ataupun dari sub sektor. Pendekatan produksi sering dipergunakan dalam memperkiraan tingkat pertambahan pada sektor yang memproduksi barang berbentuk fisik yang dikelompokkan dalam 17 kategori lapangan usaha, yaitu:

- a. Sektor pertanian, kehutan, dan perikanan;
- b. Sektor pertambangan dan penggalian;
- c. Sektor industri pengolahan;
- d. Sektor pengadaan listrik dan gas;
- e. Sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah maupun daur ulang;
- f. Konstruksi;
- g. Perdagangan besar maupun kecil, serta reparasi sepeda motor dan mobil;
- h. Transportasi dan pergudangan;
- i. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- j. Informasi maupun komunikasi;
- k. Jasa keuangan maupun asuransi;
- l. Real estat;
- m. Jasa perusahaan;
- n. Administrasi pemerintah, pertahanan maupun jaminan sosial;
- o. Pendidikan;
- p. Kesehatan maupun kegiatan sosial;
- q. Jasa lain-lain.

Setiap kategori lapangan usaha yang telah diuraikan di atas kemudian di jelaskan lagi kedalam bentuk sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Berdasarkan Pendekatan Pendapatan

Penghitungan PDRB melalui metode pendekatan pendapatan dilakukan dengan menambahkan seluruh balas jasa yang diterima seperti upah, gaji, maupun surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Namun sektor yang

dimiliki pemerintah karena tidak mencari keuntungan, maka tidak dilakukan penghitungan.

3. Berdasarkan Pendekatan Pengeluaran

PDRB dapat dihitung dengan melalui metode pendekatan pengeluaran yaitu dengan menambahkan setiap jumlah penggunaan akhir dari barang maupun jasa yang diproduksi oleh sektor dalam negeri. Total produksi atau penyediaan barang maupun jasa dilihat dari penggunaannya, yaitu digunakan untuk:

- a. Sebagai konsumsi rumah tangga;
- b. Sebagai konsumsi pihak lembaga swasta yang tidak mencari untung;
- c. Sebagai konsumsi pihak pemerintah;
- d. Sebagai pembentuk modal tetap bruto (investasi);
- e. Perubahan jumlah stok; dan
- f. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).³⁹

PDRB berdasarkan metode tidak langsung atau juga bisa disebut dengan metode alokasi. menghitung PDRB berdasarkan metode tidak langsung yaitu dengan melakukan penghitungan melalui alokasi PDRB pada wilayah tertentu. Guna melakukan perhitungan melalui metode tidak langsung maka perlu memperhatikan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu:

1. Nilai produksi bruto atau netto pada sektor-sektor atau subsektor;
2. Tingkat produksi fisik;
3. Tenaga kerja;
4. Penduduk; dan
5. Alokator tidak langsung lainnya.

Kondisi perekonomian nasional pada setiap tahunnya dapat dilihat melalui data pendapatan regionalnya. Manfaat dari penggunaan data PDRB adalah sebagai berikut:

1. Tingkat PDRB yang tinggi berarti perekonomian membaik, sebaliknya jika tingkat PDRB rendah berarti kemampuan sumber daya ekonomi sedang turun.
2. PDRB berdasarkan harga konstan (riil) dipakai dalam memperlihatkan suatu laju pertumbuhan ekonomi menyeluruh maupun pada sektor pada periode tertentu.

³⁹ Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Bruto Kabupaten Kudus Menurut Pengeluaran*, 2-3.

3. PDRB menurut ADHB berdasarkan sektor memperlihatkan bagaimana struktur ekonomi dalam sebuah negara berbagai sektor ekonomi yang memiliki pengaruh pada suatu negara tersebut.
4. PDRB menurut ADHB berdasarkan pengeluaran menggambarkan produk dan jasa yang dipakai sebagai konsumsi akhir, investasi, maupun diperjualbelikan dengan pihak asing.
5. Distribusi PDRB pengeluaran menggambarkan peran suatu lembaga dalam penggunaan barang maupun jasa yang diproduksi oleh sektor-sektor ekonomi.
6. PDRB menurut pengeluaran berdasarkan ADHK memiliki manfaat dalam menghitung laju pertumbuhan ekonomi akhir, investasi maupun perdagangan asing.
7. PDRB per kapita berdasarkan ADHB menggambarkan nilai PDRB per kapita atau per satu orang masyarakat.
8. PDRB per kapita berdasarkan ADHK memiliki kegunaan dalam mengetahui pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk pada wilayah tertentu.⁴⁰

E. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Belanja Modal dan Prduk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perspektif merupakan sebuah asumsi, nilai, gagasan yang memberikan pengaruh pandangan seseorang yang kemudian akan memberikan dampak tindakan yang dapat mempengaruhi sudut pandang seseorang dalam membuat opini.⁴¹ Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu yang melihat problematika ekonomi di masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur Islami di dalamnya seperti Al-Qur'an maupun As-sunnah.⁴² Pandangan ekonomi berdasarkan agama Islam adalah cara pandang terhadap problematika ekonomi dengan melibatkan unsur-unsur Islami dan sesuai ketentuan syariah.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dipandang positif oleh Islam selagi dengan ketentuan-ketentuan

⁴⁰ Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Bruto Kabupaten Kudus Menurut Pengeluaran*, 4.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), 1062.

⁴² Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 11.

secara syariah dan tidak menimbulkan hal buruk yang mampu memberikan efek bahaya. Aktivitas ekonomi dipandang oleh Islam sebagai salah satu hal penting dalam memperoleh kemuliaan (*falah*). Karena itu aktivitas ekonomi pada suatu wilayah harus diawasi agar berjalan dengan baik. Berikut pandangan Islam mengenai PMDN, belanja modal dan PDRB.

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Penanaman modal pada perspektif ekonomi Islam ialah kegiatan yang diharuskan dalam Islam karena harta yang di investasikan nantinya dapat produktif dan memberikan manfaat.⁴³ Penanaman modal atau *istismar*⁴⁴ yang memiliki makna menjadi tumbuh, serta meningkat. Penanaman modal juga memiliki arti menunda untuk memanfaatkan harta yang dimiliki, atau menyimpan, mengembangkan dan mengelola harta yang dimiliki tersebut sesuai anjuran Allah SWT. Ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang perintah untuk menanamkan modal sebagian hartanya yaitu terdapat pada Q.S Yusuf Ayat 46-49. Allah SWT berfirman:⁴⁵

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ
يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
يَابَسَتْ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ

⁴³ Mashuri, "Faktor-Faktor Investasi Dalam Pandangan Islam," *Astishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 2 (2018): 144.

⁴⁴ Bank Indoneisa, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah, 2006), 30.

⁴⁵ Alquran, Yusuf ayat 46-49, *Mukadimah Alquran dan Terjemahnya* (Yogyakarta: Departemen Agama RI, UII Press Yogyakarta, 2006), 519.

شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
 يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “(Setelah pelayanan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): “Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang di makan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.”. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa: Maka yang akan kamu tuai hendaklah kamu biarkan bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia di beri hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.”

Ayat tersebut memberikan pembelajaran agar tidak menghabiskan seluruh harta langsung, namun sebaiknya harta yang dimiliki dapat ditangguhkan dan diambil manfaatnya nanti di masa depan.⁴⁶

Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa mennginvestasikan hartanya untuk tabungan nantinya.⁴⁷ Aktivitas ekonomi bisnis maupun penanaman modal dalam

⁴⁶ Alquran, Yusuf ayat 46-49, *Mukadimah Alquran dan Terjemahnya*, 520-521.

⁴⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 191.

Islam adalah sebagian dari ibadah, sebab itu prinsip yang dipakai adalah *halalan thayyiban*. Dan tidak mengandung *israf* (berlebihan) dan *riba*. Dalam kegiatan penanaman modal Islam mengajarkan untuk setiap umatnya selalu berusaha dalam mendapatkan kehidupan yang baik dalam dunia dan di akhirat untuk mencapai kesejahteraan lahir maupun batin (*falah*).⁴⁸

b. Indikator Syariah Mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan perspektif agama Islam, terdapat batasan yang jelas bahwa tidak semua penanaman modal yang diakui oleh hukum positif, diakui pula oleh syariah. Oleh sebab itu agar penanaman modal di Kabupaten Kudus tidak bertentangan dengan Fatwa No. 20/DSN-MUI/V/2001 serta Perda Kabupaten Kudus No. 10 Tahun 2015, dan Perda No. 12 Tahun 2004. Menurut Sofiniyah Gufron terdapat beberapa hal yang harus dimiliki dalam berinvestasi penanaman modal menurut perspektif ekonomi Islam:⁴⁹

- 1) Material atau finansial, investasi penanaman modal pada wilayah Kabupaten Kudus hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif.
- 2) Kehalalan, tempat usaha penanaman modal harus terhindar dari bidang maupun prosedur syubhat atau haram. Berdasarkan Perda Kabupaten Kudus No. 10 Tahun 2015 tidak diperbolehkannya pendirian tempat usaha hiburan diskotik, kelab malam, PUB, dan penataan hiburan karaoke pada Kabupaten Kudus.
- 3) Sosial dan lingkungan, investasi penanaman modal hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dilarang mendirikan usaha pembuatan minuman keras serta pengedaran minuman beralkohol pada wilayah Kabupaten Kudus sesuai dengan Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 yang bertentangan dengan

⁴⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

⁴⁹ Sofiniyah Gufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Kruangan dan Investasi Syariah. Cet. 1* (Jakarta: Renaisan 2005), 16-17

syariah Islam karena merusak moral dan bersifat mudharat.

- 4) Pengaharapan ridho kepada Allah, suatu bentuk investasi penanaman modal pada wilayah Kabupaten Kudus yang mayoritas beragama Islam adalah dalam rangka mencapai ridha Allah SWT.

2. Belanja Modal

a. Belanja Modal Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Belanja modal merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti dalam pelayanan fasilitas publik.

Sebagai perwujudan dalam membangun daerah, berdasarkan cara pandang agama Islam pemerintah memiliki peran dalam mengatur keuangan negara guna dipakai meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mewujudkan tujuan negara bagi kesejahteraan masyarakat dan menambah ketakwaan.

Al-Qur'an mengatur mengenai kebijakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk distribusi secara menyeluruh. Islam bukan menganjurkan untuk mengakumulasi kekayaan sebanyak banyaknya, Agama Islam juga memberikan pengarahannya untuk lebih melakukan pengeluaran bagi kesejahteraan masyarakat. Ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pengeluaran terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 219. Allah SWT berfirman.⁵⁰

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “... Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah (dari apa yang di perlukan).”Demikian Allah menarangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”

⁵⁰ Alquran, Al-Baqarah ayat 219, *Al-Kalam Digital* (bandung: Diponegoro, 2009), 34.

Pada penjelasan ayat tersebut Islam bukan menyuruh untuk mengeluarkan harta untuk pemborosan, namun Islam juga mengutuk penimbunan harta sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan. Seluruh filsafat ekonomi mengenai pengeluaran adalah mengedarkan surplus kekayaan serta melakukan penjaminan bahwa harta yang dikeluarkan pemerintah berdistribusi secara merata. Sesuai dengan sumber penerimaan anggaran yang diterima oleh pemerintah, maka dapat disalurkan salah satunya untuk belanja modal.

b. Indikator Syariah Mengenai Belanja Modal

Belanja modal pada pandangan ekonomi Islam merupakan hal yang utama, karena konsentrasi ekonomi Islam adalah distribusi ekonomi yang merata agar setiap orang mendapatkan standar hidup yang manusiawi, terhormat, dan sesuai martabat manusia sebagai *khalifah* Allah. Al-Tariqi dalam pandangan ekonomi Islam, menjelaskan bahwa belanja modal melalui produk domestik regional bruto harus memiliki hal-hal sebagai berikut:⁵¹

- 1) Berimbang (*Tawazun*), Islam melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan berlandaskannya asas keadilan distribusi melalui belanja modal. Dalam pandangan Islam keberimbangan di tujukkan dengan langkah kebijakan pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan baik di kota maupun di wilayah pedesaan.
- 2) Kedilan (*Adalah*), seperti di jelaskan di atas, bahwa belanja modal harus di distribusikan secara adil, sehingga tidak terjadi kesenjangan antar wilayah Kabupaten Kudus, disinilah pentingnya pemerataan belanja modal secara adil.
- 3) Mencukupi (*Kifayah*), Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik keadilan, namun adil tersebut harus mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi seluruh wilayah Kabupaten Kudus dalam bidang pengalokasian harta dalam bentuk belanja modal.

⁵¹ Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania: 2004), 301-322.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai suatu perkembangan kenaikan produktivitas yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Tujuan pertumbuhan ekonomi berdasarkan agama Islam tidak hanya mencari kebahagiaan dunia namun juga mencari kebahagiaan akhirat, sehingga tujuan pertumbuhan ekonomi berdasarkan agama Islam bersifat menyeluruh (*integral*).

PDRB untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami peningkatan atau tidak. Pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat menjadi parameter *falah* melalui pendapatan perkapita masyarakat.

Kajian ekonomi Islam mengenai pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para tokoh pemikir ekonomi Islam klasik. Ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi terdapat pada Q.S Hud ayat 61. Allah SWT berfirman:⁵²

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara merek shaleh. Shaleh berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kaum dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampun-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

⁵² Alquran, Hud ayat 61, *Alquran dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 182.

Ayat diatas menjelaskan mengenai manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk merawat alam semesta. Kandungan dalam arti pemakmuran alam yaitu tentang pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi, seperti halnya manusia tercipta dari tanah yang di berasal dari bumi alam semesta, maka memang seharusnya agar merawat dan melestarikan alam semesta.

Berdasarkan penjelasan di atas, tolak ukur pertumbuhan ekonomi secara Islam tidak hanya mengenai materi, namun juga dilihat dari sikap manusia dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, serta kegiatan sosial lainnya.⁵³

b. Indikator Syariah Mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi pada pandangan ekonomi Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan produksi barang ataupun jasa pada wilayah Kabupaten Kudus tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut terbukti memberikan efek dan membahayakan terhadap manusia. Menurut Al-Tariqi dalam pandangan ekonomi Islam, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui produk domestik regional bruto harus memiliki hal-hal sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Komprehensif (*al-Syumul*), Islam melihat bahwa pertumbuhan ekonomi lebih dari sekedar persoalan materi namun juga pada persoalan moral, sosial, spiritual sehingga kebahagiaan yang dicapai tidak hanya kebahagiaan dunia, namun juga kebahagiaan akhirat.
- 2) Realistis (*Waqi''yyah*), Islam merupakan agama yang berasal dari Allah, tidak mungkin menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya. Realistis Islam adalah idealis dan idealis Islam adalah realistis.
- 3) Bertanggung jawab (*Mas'uliyah*), Islam memberikan kebebasan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi guna meningkatkan

⁵³ Almizan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2016): 207.

⁵⁴ Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, 301-322.

produk domestik regional bruto, namun kebebasan tersebut tidak diberikan secara absolut tanpa batas namun dibatasi oleh berbagai aturan. Pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan faktor ekologi dengan tidak mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestariannya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dijadikan sebagai rujukan, inspirasi maupun referensi pada penelitian ini dipaparkan dalam bentuk tabel serta diuraikan secara singkat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Irwan Pirda Atmi Danisa (2019), Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing serta Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Profinsi Kalimantan Timur.	Independen - Penanaman Modal Dalam Negeri - Penanaman Modal Asing - Belanja Pemerintah Dependen - Pertumbuhan Ekonomi	Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan metode path.	- PMDN dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - Belanja pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - PMDN dan PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja - PMA berpengaruh positif dan tidak signifikan	Persamaan pada penelitian ini yaitu dalam penggunaan variabel independen PMDN, sama-sama menggunakan PDRB sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi, dan sama-sama menggunakan metode analisis regresi linear berganda Perbedaan pada penelitian nanti yaitu pada penggunaan variabel belanja modal.

				<p>terhadap kesempatan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kesempatan kerja - PMDN, PMA, dan belanja pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi. 	
2.	<p>Hanani Aprilia Adi dan Syahlina (2020), Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) an Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jambi.</p>	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) - Penanaman Modal Asing (PMA) <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 	<p>Analisis Regresi Linear Berganda dengan Data <i>Time Series</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PMDN dan PMA berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). 	<p>Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel PMDN dan PDRB. Dan sama-sama menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Perbedaannya yaitu pada penelitian nanti menggunakan variabel dependen belanja modal.</p>
3.	<p>Wardhiah (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAD - Belanja Modal <p>Dependen</p>	<p>Analisis Linear Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 	<p>Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama</p>

	<p>dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.</p>	<p>- Pertumbuhan ekonomi</p>		<p>ekonomi. - Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>menggunakan variabel belanja modal, serta penggunaan PDRB sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi, dan penelitian nantinya juga menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Perbedaannya yaitu pada penelitian nanti menggunakan variabel independen PMDN yang tidak dibahas pada penelitian terdahulu.</p>
4.	<p>Parsito Sanneng (2016), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan.</p>	<p>Independen - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Belanja Modal - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dependen - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).</p>	<p>Analisis Regresi Berganda.</p>	<p>- PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. - PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel PMDN dan belanja modal serta PDRB dalam penelitian, dan sama-sama menggunakan metode analisis regresi linear berganda pada penelitian.</p>

5.	Ervino Dani Yusanto (2020), Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur Tahun (2001-2017).	Independen - Penanaman Modal Dalam Negeri - Penanaman Modal Asing - Belanja Daerah Dependen - Produk Domestik Regional bruto (PDRB).	Analisis Ordinary Least Square (OLS).	- PAD dan PMA berpengaruh positif signifikan terhadap produk Domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur. - PMDN tidak berpengaruh signifikan Terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Timur.	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel PMDN dan PDRB dalam penelitian. Perbedaan pada penelitian nanti yaitu menggunakan variabel belanja modal. Dan penelitian nantinya menggunakan metode analisis regresi linear berganda.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Berbagai Penelitian terdahulu.

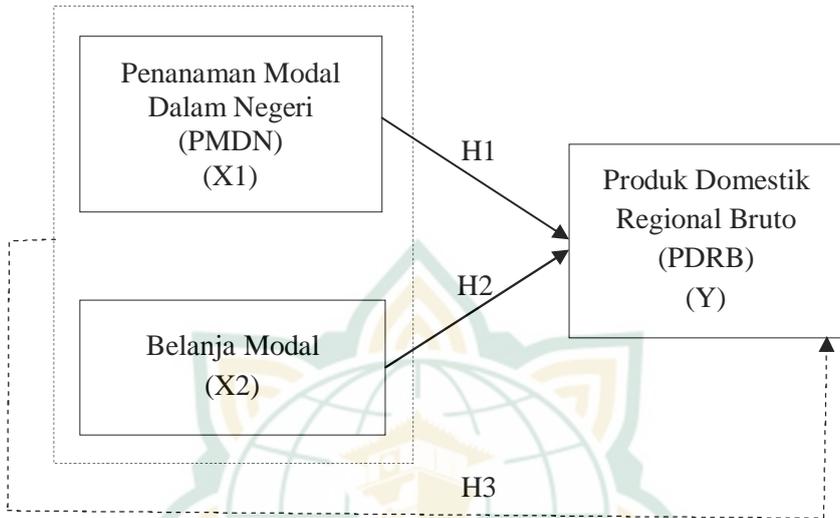
Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan menggabungkan variabel-variabel yang berbeda dari penelitian terdahulu (yang tertulis diatas) yang berjudul Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Belanja Modal Berbasis Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2019.

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah hubungan antara variabel yang tersusun oleh teori-teori yang dideskripsikan. Kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan sebuah sintesa mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hasil dari sintesa yang telah dianalisis tadi akan digunakan dalam perumusan hipotesis.⁵⁵

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), 49.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



H. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau ramalan pada rumusan masalah penelitian. Karena jawaban baru berlandaskan teori dan belum dilakukan penelitian berdasarkan fakta data-data yang ada karena itulah dikatakan dengan dugaan sementara.⁵⁶

Berdasarkan gambar tabel 2.2 di atas, variabel di atas adalah variabel yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengkaji kembali variabel-variabel tersebut karena terdapat kesamaan pada variabel bebas, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan belanja modal. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu mengambil objek penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus.

1. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sebagian besar apar ahli ekonomi berpendapat bahwa penanaman modal dalam negeri ialah bagian dari penentu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal merupakan salah satu kegiatan yang harus ditingkatkan pada setiap daerah, masyarakat harus sadar untuk melakukan

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 51.

investasi karena akan memberikan manfaat yang akan dirasakan nantinya. Pembentukan penanaman modal baik PMDN dipandang menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Sehingga terjadi hubungan yang positif antara PMDN dengan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat penanaman modal daerah dapat menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan menentukan lesu tidaknya pembangunan ekonomi daerah. Alokasi modal pada suatu daerah dapat digunakan untuk melakukan pembangunan tempat atau gedung maupun fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan guna produktifitas masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang. Sektor swasta maupun rumah tangga menjadi salah satu penyumbang penanaman modal dalam negeri dan menyebabkan salah satu faktor peningkat PDRB sehingga menjadi penguat pertumbuhan ekonomi pada daerah.⁵⁷

Riset dari Irwan Pirda Atmi Danisa (2019) menampilkan hasil bahwa PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Riset oleh Hanani Aprilia Adi dan Syahlina (2020) menampilkan bahwa hasil PMDN berpengaruh terhadap PDRB.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) adalah:

H1 : Diduga penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif signifikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB).

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Belanja modal ialah bagian dari belanja pemerintah yang manfaatnya dapat dirasakan selama satu periode dan meningkatkan pendapatan daerah yang kemudian akan menambah belanja secara rutin seperti belanja administrasi maupun pemeliharaan lainnya.⁵⁸

Berdasarkan perdirjen perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 mengenai pedoman penggunaan AKUN

⁵⁷ Payaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985), 21.

⁵⁸ Sadono Sukirno, *Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 45.

pendapatan, belanja pegawai, dan belanja modal sesuai BAS. Berdasarkan perdirjen tersebut belanja modal dapat dikatakan sebagai belanja modal dengan memiliki syarat sebagai berikut: a) pengeluaran menyebabkan adanya pendapatan aset tetap maupun aset lainnya, b) pengeluaran melebihi batas minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah, c) aset harus diniatkan untuk tidak dijual.

Riset dari Parsito Sanneng (2016) menampilkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Dari paparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis belanja modal terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) adalah:

H2 : Diduga belanja modal berpengaruh positif signifikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB).

3. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Investasi PMDN memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian, investasi PMDN mendorong naiknya output dan juga akan meningkatkan input, sehingga hal tersebut mampu meningkatkan pajak dan meningkatkan PAD. Belanja modal ialah pengeluaran dalam pembentukan aset tetap seperti tanah, perawatan jalan, mesin, irigasi, dll. Guna memberi pelayanan terhadap masyarakat sehingga mampu meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat. Semakin tinggi jumlah belanja modal pemerintah daerah maka alokasi penggandaan aset tetap juga akan meningkat, sehingga proyek penggandaan barang pada wilayah Kabupaten Kudus juga akan naik. Apabila infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki sudah baik dan memadai, maka diharapkan pendistribusian barang modal ataupun industri akan lebih cepat, sehingga mampu meningkatkan iklim investasi pada masyarakat wilayah Kabupaten Kudus. Apabila iklim investasi PMDN meningkat, maka diharapkan PDRB juga akan naik.

Dari paparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan belanja modal terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) adalah:

H3 : Diduga penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan belanja modal berpengaruh positif signifikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB).

Sehingga dari hipotesis yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Diduga penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif signifikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Kudus tahun 2018-2019.
2. Diduga belanja modal berpengaruh positif signifikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Kudus tahun 2018-2019.
3. Diduga penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan belanja modal berpengaruh positif signifikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Kudus tahun 2018-2019.

